

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tata kelola di sekolah akan efektif jika para pengelola pendidikan mampu melibatkan *stakeholders* terutama dalam peningkatan peran serta masyarakat untuk menentukan kewenangan, administrasian, dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh sekolah masing-masing. Salah satu model keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan pendidikan yang telah lama yaitu pembentukan *school board* sebagai wujud pengembangan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan.¹

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik untuk menjaga kelestarian dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Sekolah diselenggarakan untuk dapat menjaga kelestarian nilai-nilai positif masyarakat, dengan harapan sekolah dapat mewariskan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dengan baik dan benar. Sekolah juga berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*), dimana sekolah dapat mengadakan perubahan nilai-nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat dalam kemajuan dan pembangunan.

Keberadaan dan kemajuan suatu lembaga pendidikan tidak lepas dari peran masyarakat, yaitu keikutsertaan atau partisipasi masyarakat untuk turut mendukung keberlangsungan proses penyelenggaraan pendidikan di

¹ Syaiful Sagala, "Dukungan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khususnya di Sekolah." *Generasi Kampus*, Volume 1 (2008) , 51.

sekolah. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan partisipasi masyarakat lembaga pendidikan tidak dapat tereselenggara dan berkembang sesuai dengan tujuan yang diharapkan²

Dalam dunia pendidikan, sudah kita ketahui bersama bahwa tanpa adanya dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, karena pada hakikatnya lembaga pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga sebaliknya masyarakat juga dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Dimana keduanya memang memiliki daya interaksi yang sangat berpengaruh.

Pada penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikelola pemerintah ataupun yayasan, akan menjadi sorotan bagi masyarakat mengenai hasil dari proses pelaksanaan pendidikannya, penyelenggaraan pendidikan harus bisa bermutu dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, dengan begitu akan memunculkan partisipasi masyarakat dan rasa memiliki serta tanggung jawab masyarakat pada lembaga tersebut.³

Yayasan ataupun lembaga akan tetap menjadi pusat perhatian masyarakat, terutama dari hasil proses pada penyelenggaraan suatu pendidikan dimana lembaga ataupun yayasan harus memiliki mutu yang tinggi, pengan begitu masyarakat akan memberikan partisipasi tersebut kepada lembaga

² Istiqomah, "Pelaksanaan Program Kehumasan Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Sekolah Menengah Kejuruan PIRI 1 Yogyakarta." *Jurnal Hanata Widya*, Volume 6 (2017), 30.

³ K.A.Rahman, "Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat" *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 2 (Desember,2012) ,228.

khususnya pada proses penyelenggaraan pendidikan agar tetap maju dan bermutu.

Madrasah harus bisa menjadi penerang bagi masyarakat, madrasah harus mampu memberikan tauladan tentang cara hidup yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi berdaya, madrasah harus bisa menampung semua aspirasi dan kondisi masyarakat. Semisal hubungan komite sekolah yang sering menjalin kontak dengan madrasah atau lembaga melalui pertemuan bulanan yang biasanya dihadiri oleh wali santri dengan tujuannya untuk bertukar informasi, penyampaian ide baru yang pada akhirnya membutuhkan proses pengambilan keputusan.⁴

Hubungan sekolah dan masyarakat dilakukan untuk menjembatani kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat itu sendiri. Sekolah melakukan komunikasi dengan masyarakat agar memahami kebutuhan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha kooperatif untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling pengertian antara sekolah, personil sekolah, dan anggota masyarakat.⁵

Dengan adanya pemahaman diatas, pihak sekolah memiliki keterkaitan hubungan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Keterkaitan tersebut akan muncul dengan adanya kepentingan pada sekolah dan juga masyarakat khususnya kepentingan pada penyelenggaraan pendidikan.

⁴ Ahmad Sulhan, "Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat" *Jurnal Penelitian Keislaman*, Volume 13, (2017), 4.

⁵ Rohiat, *Manajemen Sekolah- Teori dan Praktik*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2012), 28.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan hal yang mutlak terjadi. Perlibatan masyarakat dan kolaborasi antar anggotanya menjadi "*cornerstones*" usaha untuk efektivitas suatu pendidikan. Masyarakat, dengan demikian, merupakan stake holder yang pertama dan utama dalam proses pendidikan. Tingkat keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada sejauh mana tingkat keterlibatan dengan masyarakat (*community involvement*) dan keikutsertaan masyarakat (*community participation*) dalam proses penyelenggaraan pendidikan.⁶

Dalam pendidikan sudah sangat pasti membutuhkan keterlibatan masyarakat didalamnya karena dengan demikian dengan menjalin hubungan antar masyarakat yang ada akan membantu dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat membantu dalam menunjang keberhasilan pendidikan tersebut. Dengan begitu bisa dipastikan jika penyelenggara pendidikan mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat bisa dipastikan pendidikan akan bermutu dan masyarakat yang akan ikut merasakannya.

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah – tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, dan simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut untuk

⁶ Nurhatti Fuad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 109.

menusekseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis.⁷

Harus kita sadari bahwa hubungan lembaga dan masyarakat merupakan ikatan yang sangat penting dan kuat adanya dan juga tidak bisa dipisahkan yang keduanya sudah menjadi satu kesatuan dalam penyelenggaraan pendidikan, lembaga membutuhkan masyarakat untuk menjadi sumber inspirasi dan aspirasi pada lembaga, juga sebaliknya masyarakat juga membutuhkan lembaga.

Dalam dunia pendidikan masyarakat sekolah merupakan kumpulan orang yang bergelut dalam dunia pendidikan baik, maka dalam hal ini masyarakat dapat kita kelompokkan menjadi tiga kelompok, masyarakat orang tua siswa yakni masyarakat yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah tersebut, masyarakat yang terorganisasi misalnya kelompok organisasi bisnis, sosial, dan masyarakat secara luas dalam artian masyarakat secara umum. Dalam ketiga pengelompokan masyarakat tersebut ketiganya merupakan masyarakat *eksternal* yang mana dalam artian sebagai pendukung atas terselenggaranya pengelolaan pendidikan, lain halnya dengan masyarakat *internal* yakni masyarakat yang memang kesehariannya bergelut dan mempunyai factor utama atas terselenggaranya pendidikan seperti, pendidik dan tenaga kependidikan.⁸

⁷ Abdul Rahmat, *Manajemen Humas Sekolah*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016) , 119.

⁸ Abdul Aziz, *Pengantar Manajemen dan Subtansi Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Pena Salsabila, 2017), 227.

Masyarakat sekolah merupakan komunitas orang yang berbaaur dalam pendidikan terutama dalam proses penyelenggaraan pendidikan, masyarakat disini terbagi dari masyarakat *internal* dan juga masyarakat *eksternal*, dimana masyarakat *internal* maupun *eksternal* sama- sama memiliki peranan penting pada proses penyelenggaraan pendidikan.

Keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan. Masyarakat perlu membantu penyelenggaraan pendidikan, kerjasama yang baik antar pihak sekolah dengan masyarakat baik dari segi pemikiran, tenaga pembiayaan, serta pemecahan masalah yang dihadapi lembaga akan memacu pendidikan yang di harapkan.⁹

Maka untuk mendapatkan hasil yang di inginkan pada pengelolaan lembaga diperlukan suatu interaksi antar masyarakat dengan baik karena jika kita melakukan interaksi dengan baik maka pengelola pendidikan pulalah yang akan bangga dan puas atas apa yang diperoleh tak luput masyarakat pun juga akan puas.

Bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga dapat berupa pemberian support seperti dukungan dana dan tenaga, keterlibatan dalam pengambilan keputusan (*involvement*), karena salah satu kebutuhan dasar untuk pengerahan sumber daya pembangunan sekolah.¹⁰

⁹Ibid. 225.

¹⁰ Fuad, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, 111.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan suatu pendidikan, partisipasi masyarakat juga merupakan factor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu program, dengan begitu melalui pengambilan keputusan pada pembangunan suatu lembaga merupakan jalan alternatif untuk menangani masalah guna mendapatkan titik temunya.¹¹

Sederhananya, pengambilan keputusan merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat juga *respond* baik dari masyarakat yang dikeluarkan untuk proses penyelenggaraan pendidikan, dengan adanya *feedback* dari masyarakat sekolah bisa berpengaruh pada tingkat keberhasilan suatu pendidikan, maka untuk menangani adanya masalah diperlukan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat agar menemukan titi alternatifnya.

Dalam hal keterlibatan masyarakat atau *participation public* yang mana hal ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 dalam hal Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan bahwa, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan¹²

Adanya pasrtipasi masyarakat juga penting untuk kemudian dapat memberikan dorongan kepada masyarakat secara mandiri untuk ikut dalam menentukan nasib pendidikan bangsa. Maka sudah jelas adanya hubungan antara sekolah dan amsyarakat memiliki peranan penting dan mempunyai manajemen

¹¹ Arif Pahmi Yazid, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Sukahurip” *Jurnal Moderat*, Volume 3, (2019), 4.

¹² *UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta

tersendiri dalam pengelolaan pendidikan, sehingga keberadaanya sangat menjadi dibutuhkan. Karenanya kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga harus dikembangkan secara sinergis.¹³

Dengan begitu dalam pelaksanaan pembangunan lembaga harus ada rangsangan dari lembaga agar masyarakat termotivasi untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan keterlibatan lainnya. Semakin banyak melibatkan masyarakat maka semakin bagus pulalah pembangunan dalam meningkatkan kemajuan lembaga ataupun pemerintah. Dalam partisipasi memberikan sumbangsih dengan tidak melupakan nilai- nilai kemanusiaan, dan visi misi yang menjadi cita-cita bagi lembaga agar lembaga bisa berkembang pesat.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi ini merupakan wujud dari kesadaran pemilihan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas dan menumbuhkan partisipasi yang aktif, salah satu wujud dari partisipasi tersebut dengan dibentuknya komite sekolah.¹⁴

Dengan adanya pasrtipasi yang melibatkan masyarakat merupakan penerapan dari kesadaran masyarakat akan pentingnya tingkat pendidikan terlebih di era seperti sekarang, dan mendorong masyarakat untuk berani bertanggung jawab keberadaan lembaga pendidikan sehingga lembaga

¹³ Alfian Khairani, "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqon Banjarmasin" *Tashwir*, Volume1(2013) ,62-63.

¹⁴ Dasrul Fauzi, "Srategi Kepala Madrasah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan di MTs Ma'had Islami Kota Pakayumbuh." *Jurnal Al-Fikrah*, Volume VI (2018), 150

pendidikan bisa berjalan sesuai visi dan misi yang menjadi cita-cita lembaga tersebut.

Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan, yakni pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebagian besar baik dari segi waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan.¹⁵ Peran yang meningkat dalam pengambilan keputusan memiliki dampak dalam meningkatnya keterkaitan pada organisasi, dan kepuasan pekerjaan.¹⁶

Selain keputusan yang dianggap penting bagi pengelola pendidikan yang juga berpengaruh terhadap meningkatnya pada sebuah organisasi dan rasa bangga akan pekerjaan yang sudah mereka jalani, sehingga tak bisa dipungkiri bahwa mereka akan puas terhadap peran yang mereka emban selama ini.

Dalam pengambilan keputusan bisa dikatakan keputusan yang baik terjadi jika langkah dalam pengambilan keputusan sepenuhnya mengerti dalam artian mengerti akan latar belakangnya, tujuannya, dan sasaran alternatifnya serta penyebab dan juga konsekuensinya, akan tetapi keputusan yang dibuat dengan baik belum jadi keputusan yang efektif. Keputusan yang efektif yakni keputusan yang bergantung pada tiga hal yaitu, kualitas keputusan, penerimaan bawahan, dan ketepatan waktu. Keputusan yang berkualitas jika mampu memecahkan masalah yang dihadapi baik seseorang ataupun masyarakat.¹⁷

¹⁵ Eti Rochaety, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 151.

¹⁶ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 171.

¹⁷ Muhdi, "Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume, 4 (2017) , 3.

Bisa dikatakan keputusan yang baik apabila langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan sesuai dengan masalah yang ada, maka sebelum melakukan tindakan pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan melalui rapat harusnya melakukan tindakan penelitian atau identifikasi masalah sehingga setelah melakukan identifikasi masalah dapat menentukan hasil dari pengambilan keputusan tersebut.

Adapun unsur dalam pengambilan keputusan yang harus digunakan oleh pimpinan yakni, terlebih dahulu harus mengkaji dan mempertimbangkan mengenai tujuan pengambilan keputusan, identifikasi masalah, faktor internal maupun internal dalam pengambilan keputusan yang ada pada lembaga maupun organisasi. Agar mendapatkan hasil dari pengambilan keputusan yang logis membutuhkan pemahaman yang baik terhadap masalah yang ada dan mengetahui alternatif pemecahannya serta informasi yang lebih tepat dalam pengambilan keputusan.¹⁸

Sebelum mengambil keputusan seharusnya dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara organisasi maupun lembaga harus benar-benar paham pada titik masalah yang akan menjadi pembahasan kita pada proses pengambilan keputusan nantinya, sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada sebuah lembaga ataupun organisasi.

SMPN 3 Pamekasan yang terletak di Jl. Bahagia No. 6, Bugih, Kecamatan. Pamekasan, Kab. Pamekasan dibawah naungan Kemendikbud

¹⁸ Anastasia Lipursari, "Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan", *Jurnal STIE Semarang*, Volume 5 (2013), 33.

dengan seorang kepala sekolah bapak Abdurrahman yang saat ini status sekolah tersebut terakreditasi A. Melalui proses pra lapangan yang peneliti lakukan di SMPN 3 Pamekasan tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, di SMPN 3 Pamekasan sudah lama menerapkan partisipasi yang melibatkan masyarakat, dengan berbagai macam bentuk seperti, mengeluarkan gagasan atau ide pada setiap pertemuan dan juga ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah tersebut, dan sampai saat ini berjalan dengan lancar. Sehingga tak jarang hubungan sekolah ini dengan masyarakat cukup baik.

Menurut bapak Abdurrahman M.Pd., beliau menjelaskan bahwa program kehumasan di sini sudah cukup baik pada proses pelaksanaannya, sehingga tak heran jika masyarakat cukup merangkul akan adanya sekolah ditengah-tengah mereka.¹⁹ Hal ini juga diperjelas oleh Ibu. Tiwik Susanti, S.Pd. selaku bagian kehumasan beliau menegaskan, bahwa masyarakat sekolah sudah berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan terlebih pada saat melaukan pertemuan, mereka sangat antusias untuk memberikan ide-ide mereka.²⁰

Maka berangkat dari konteks penelitian dan dengan informasi yang telah didapat dilapangan, setelah peneliti melakukan pra lapangan di SMPN 3 Pamekasan, maka peneliti mengangkat judul penelitian “ *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan di SMPN 3 Pamekasan*”

¹⁹ Abdurrahman, Kepala Sekolah SMPN 3 Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Oktober 2019).

²⁰ Tiwik Susanti, Bagian Kehumasan SMPN 3 Pamekasan, Wawancara Langsung, (17 Oktober 2019).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana model partisipasi masyarakat melalui komite dalam pengambilan keputusan di SMPN 3 Pamekasan?
2. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui komite dalam pengambilan keputusan di SMPN 3 Pamekasan?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui komite dalam pengambilan keputusan di SMPN 3 Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang digunakan di SMPN 3 guna membangun partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di SMPN 3 Pamekasan
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di SMPN 3 Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian yang dilakukan tentunya ada hasil yang diinginkan, misalnya kegunaan dari hasil penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Bagi Komite SMPN 3 Pamekasan

Melalui penelitian diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan gagasan baru pada SMPN 3 Pamekasan sehingga dapat memberikan kearah yang lebih baru dan positif terhadap kemajuan SMPN 3 Pamekasan.

- b. Bagi IAIN MADURA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian, sertadapat dijadikan tambahan referensi perpustakaan khususnya untuk jurusan Tarbiyah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca bahwa partisipasi masyarakat di SMPN 3 Pamekasan sangat membantu terhadap terselenggaranya pendidikan, dengan adanya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat terhadap sekolah dapat memberikan dampak positif bagi sekolah dan nantinya agar bisa menjadi pedoman bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari kesalah pahaman peneliti:

1. Partisipasi Masyarakat adalah Proses keikutsertaan masyarakat baik dari masyarakat luar ataupun masyarakat dalam sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan bersama dan dilakukan secara bersama.
2. Pengambilan Keputusan adalah Suatu langkah dalam mengambil atau memecahkan suatu permasalahan dengan melibatkan fakta yang ada agar keputusan yang sudah disepakati bisa menjadi pertimbangan bersama. Jadi dapat disimpulkan dalam pengambilan

keputusan disini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengambil sebuah hasil keputusan akhir dan sudah disetujui secara bersama.